

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$	25
		Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang meningkat omzetnya}}{\text{Jumlah UMKM seluruhnya}} \times 100\%$	5
2.	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	$\frac{\text{Jumlah pedagang formal tahun } n \text{ dikurangi jumlah pedagang formal tahun } (n-1)}{\text{Jumlah seluruh pedagang formal tahun } (n-1)} \times 100\%$	10
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	$\frac{\text{Jumlah IKM yang meningkat omzetnya}}{\text{Jumlah IKM seluruhnya}} \times 100\%$	9,35

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
I.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Rp 2.242.532.301
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 95.157.800
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 74.886.900
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 251.870.200
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 62.529.000
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.758.088.401
II.	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	Rp 3.054.703.607
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 18.294.645
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 1.055.263.826
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 1.435.561.700
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 127.329.336
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 95.982.700
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 215.375.800
7.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp 106.895.600
III.	Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Rp 8.725.888.589
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.725.888.589
TOTAL		Rp 14.023.124.497

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG**

Drs. H. SUMASTRO, M.Si

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$	42%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koperasi, KSP, USP koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan	Persentase koperasi, KSP, USP koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah koperasi, KSP, USP koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan}}{\text{Jumlah seluruh KSP, USP koperasi}} \times 100$	35%
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	$\frac{\text{Jumlah KSP, USP koperasi yang dinilai meningkat status kesehatannya}}{\text{Jumlah seluruh KSP, USP koperasi}} \times 100\%$	6%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	$\frac{\text{Jumlah USP koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah seluruh USP koperasi}} \times 100\%$	37,87%
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	$\frac{\text{Jumlah SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$	14,87%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$	45%
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n \text{ dikurangi Jumlah Usaha Mikro tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n-1)} \times 100\%$	5%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Usaha Mikro yang Mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n} \times 100\%$	2%
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Omset Pelaku Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil tahun } n \text{ dikurangi Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n-1)} \times 100\%$	5%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$	2%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 95.157.800
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.157.800
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 74.886.900
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74.886.900
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 251.870.200

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2	3	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	251.870.200
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	62.529.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp	62.529.000
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	1.758.088.401
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp	1.758.088.401
	TOTAL	Rp	2.242.532.301

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Drs. GUSTIAN
Pembina
NIP. 19670909 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koperasi, KSP, USP koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan	Persentase koperasi, KSP, USP koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan	35%
1.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha
2.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam kab/kota	37,87%
1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penilaian Kesehatan Unit Usaha Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.157.800,00
1.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 28.529.500,00
2.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 66.628.300,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74.886.900,00
1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 74.886.900,00
	TOTAL	Rp 170.044.700,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Pihak Pertama,
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
Pit. SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Drs. GUSTIAN
Pembina
NIP. 19670909 199803 1 009

LISMAWATI, S.I.P.
Penata
NIP. 19690901 199102 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	45%
1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	65 Orang

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 251.870.200,00
1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 251.870.200,00
	TOTAL	Rp 251.870.200,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Drs. GUSTIAN

Pembina

NIP. 19670909 199803 1 009

Pihak Pertama,

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI

LISMAWATI, S.I.P.

Penata

NIP. 19690901 199102 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Usaha Mikro yang Mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	2%
1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Unit Usaha
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Usaha	2%
1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	125 Unit Usaha

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 62.529.000,00
1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 62.529.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 1.758.088.401,00
1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp 1.758.088.401,00
	TOTAL	Rp 1.820.617.401,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Drs. GUSTIAN

Pembina

NIP. 19670909 199803 1 009

Pihak Pertama,

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO

HELMI ASWANDI, S.E.

Penata Tk. I

NIP. 19711214 200312 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	$\frac{\text{Jumlah pedagang formal tahun } n \text{ dikurangi jumlah pedagang formal tahun } (n-1)}{\text{Jumlah seluruh pedagang formal tahun } (n-1)}$	24 Pelaku Usaha
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang Ditebitkan	Persentase Jumlah surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang ditebitkan	$\frac{\text{Jumlah surat rekomendasi TDG yang ditebitkan}}{\text{Jumlah seluruh pengajuan izin TDG}} \times 100\%$	100%
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Tersedianya Surat Rekomendasi Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Ditebitkan	Persentase Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang ditebitkan	$\frac{\text{Jumlah surat rekomendasi Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang ditebitkan}}{\text{Jumlah seluruh pengajuan izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C}} \times 100\%$	100%
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya infrastruktur perdagangan serta meningkatnya pedagang	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh Sarana Distribusi Perdagangan}} \times 100\%$	83%
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya pembangunan sarana infrastruktur perdagangan	Persentase Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh Sarana Distribusi Perdagangan}} \times 100\%$	100%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya kapasitas sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	$\frac{\text{Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya}}{\text{Jumlah seluruh Sarana Distribusi Perdagangan}} \times 100\%$	25%
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilitas harga dan kualitas distribusi kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase distribusi bahan pokok dan Barang Penting	$\frac{\text{Jumlah distribusi bahan pokok}}{\text{Jumlah seluruh stok bahan pokok}} \times 100\%$	80%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh stok bahan pokok}} \times 100\%$	70%
4.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya omset pelaku usaha produk unggulan	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan	$\frac{\text{Jumlah peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan tahun } n}{\text{Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan tahun } (n-1)} \times 100\%$	7%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya promosi dagang	Cakupan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	$\frac{\text{Jumlah pameran yang diikuti dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah undangan pameran}} \times 100\%$	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 18.294.645
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 9.659.559
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Rp 8.635.086
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 1.055.263.826
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 875.011.700
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 180.252.126
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 1.435.561.700
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 1.435.561.700
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 127.329.336
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 127.329.336
	TOTAL	Rp 2.636.449.507

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

DEDI IRAWAN, S.E., M.E.
Pembina
NIP. 19820922 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya pembangunan sarana infrastruktur perdagangan	Persentase Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%
1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya sarana penunjang infrastruktur perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit
2.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun	70%
1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kegiatan monitoring kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24 Laporan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 875.011.700,00
1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 832.985.900,00
2.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 42.025.800,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 1.435.561.700,00
1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 60.083.700,00
2.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 1.375.478.000,00
	TOTAL	Rp 2.310.573.400,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

DEDI IRAWAN, S.E., M.E.
Pembina
NIP. 19820922 200604 1 006

Pihak Pertama,

PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

EDY CAHYONO, S.T.
Penata Tk. I
NIP. 19800225 200502 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang Ditebitkan	Persentase Jumlah surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang ditebitkan	100%
1.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	24 dokumen
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman di Tempat	Tersedianya Surat Rekomendasi Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Ditebitkan	Persentase Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang ditebitkan	100%
1.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Ditebitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24 dokumen
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya kapasitas sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	25%
1.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen
2.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Cakupan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	100%
1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pameran dagang yang diikuti	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	8 UMKM

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 9.659.559
1.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 9.659.559
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Rp 8.635.086
1.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Rp 8.635.086
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 180.252.126,00
1.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 100.062.239,00
2.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 80.189.887,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 127.329.336,00
1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 127.329.336,00
	TOTAL	Rp 325.876.107,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA
PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA
BINA USAHA DAN PASAR

DEDI IRAWAN, S.E., M.E.
Pembina
NIP. 19820922 200604 1 006

FLORENTINA WENSESLIA, S.E., M.E.
Penata
NIP. 19840927 201101 2 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	$\frac{\text{Jumlah alat UTTP yang ditera atau tera ulang}}{\text{Jumlah seluruh potensi alat UTTP}} \times 100\%$	93,50%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah alat UTTP yang ditera atau tera ulang}}{\text{Jumlah seluruh potensi alat UTTP}} \times 100\%$	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 95.982.700,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 95.982.700,00
	TOTAL	Rp 95.982.700,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

KEPALA UPT METROLOGI LEGAL

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

MUHAMAD KHASFAMI, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19670512 199203 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang dan diawasi	2.000 unit
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya tera/tera ulang alat UTTP	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 95.982.700,00
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 95.982.700,00
	TOTAL	Rp 95.982.700,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA UPT METROLOGI LEGAL

MUHAMAD KHASFAMI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19670512 199203 1 006

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT METROLOGI LEGAL

MUHDHORY, A.Md

Penata Muda

NIP. 19830310 201101 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya industri kecil menengah yang dibina dan dilatih	Persentase Pertambahan industri kecil dan menengah	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n \text{ dikurangi Jumlah IKM tahun } (n-1)}{\text{Jumlah IKM tahun } (n-1)} \times 100\%$	9,25%
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK}}{\text{Jumlah seluruh sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK}} \times 100\%$	33,33%
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya industri kecil menengah yang difasilitasi dalam pemenuhan izin usaha	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha	$\frac{\text{Jumlah peningkatan industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas usaha tahun } n}{\text{Jumlah seluruh industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas usaha tahun } (n-1)} \times 100\%$	2,00%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)	Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri	$\frac{\text{Jumlah penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri}}{\text{Jumlah pengajuan izin usaha industri}} \times 100\%$	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 215.375.800
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 215.375.800
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp 106.895.600
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 106.895.600
	TOTAL	Rp 322.271.400,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

DARWIS, SH
Pembina
NIP. 19670801 199310 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	33,33%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Meningkatnya IKM yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 215.375.800,00
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 44.353.600,00
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 171.022.200,00
	TOTAL	Rp 215.375.800,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN AHLI MUDA
 SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

DARWIS, SH

Pembina

NIP. 19670801 199310 1 004

YASIR DORGA, S.T.

Penata Tk. I

NIP. 19820831 200803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)	Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri	100%
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 106.895.600,00
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 83.297.600,00
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 23.598.000,00
	TOTAL	Rp 106.895.600,00

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
SARANA PRASARANA INDUSTRI
DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

DARWIS, SH

Pembina

NIP. 19670801 199310 1 004

DARMASANTI, S.T.

Penata Tk. I

NIP. 19780430200502 2 004